



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
SUB UNIT KERJA : UIN WALISONGO SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **IMAM TAUFIQ**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **500854**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

2.323.328.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/120 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 413.300.000
2. Tanah Seluas 150 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 11.200.500
3. Tanah Seluas 3281 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 67.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di SEMARANG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 326.910.000
5. Tanah Seluas 231 m2 di KUDUS, WARISAN Rp. 9.450.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/90 m2 di SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 377.300.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 307 m2/189 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 848.158.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 270.010.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

348.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000



3. MOTOR, VESPA PIAGGIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	133.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	150.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	418.919.881
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.374.248.381
III. HUTANG	Rp.	732.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.642.248.381

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.